



anggaran 2012, sehingga dengan dilatarbelakangi oleh pertanggung jawaban dimaksud sehingga disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini. Kewajiban menyusun LAKIP tersebut telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Empat, serta Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ini tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyajian LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini, akan menjadi alat bantu bagi Kepala Daerah untuk mengevaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2012, sehingga kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di waktu mendatang diharapkan akan menjadi lebih baik lagi.

Medan,           Maret 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

H. GATOT PUJO NUGROHO, ST

# DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan tujuan	2
C. Sekilas tentang Provinsi Sumatera Utara	2
C. 1 . Pemerintahan	2
C. 2. Sumber Daya Manusia	4
C. 3. Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara	6
C. 4. Kondisi Demografi	7
C. 5. Gambaran Umum Perekonomian	10
D. Sistematika Penyusunan LAKIP	22
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>23</b>
A. Perencanaan Strategik	23
1. VISI dan MISI .	23
1.1. VISI .	23
1.2. MISI.	24
1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	25
1.3.1. Tujuan	25
1.3.2. Sasaran	26
1.4. Prinsip Dasar Pembangunan	26
1.5. Strategi dan Arah Kebijakan	27
1.5.1. Strategi Dasar	27
1.5.2. Strategi Pembangunan Daerah	27
1.5.3. Prioritas Pembangunan Daerah	30
1.5.4. Arah Kebijakan	33
B. Rencana Kinerja Tahun 2012	43
B.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah	43
B.1.1. Pengukuran Indikator Kinerja	43
B.1.2. Indikator Kinerja Utama	44
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2012	49
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>68</b>
A. Pengukuran Kinerja	68
1. Pengumpulan Data Kinerja	69
2. Cara Pengukuran Kinerja	69
3. Hasil Pengukuran Kinerja	70
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	71
C. Aspek Keuangan	323
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>333</b>
A. KESIMPULAN	334
B. SARAN	

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012

Lampiran II : FORMULIR PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Lampiran III : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

**VISI** pembangunan menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2009-2013 adalah **SUMATERA UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBERAGAMAN**.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat MISI pembangunan daerah, yaitu :

- 1. Sumatera Utara Yang Maju** bermakna masyarakatnya berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta menggunakan akal sehat dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan global, namun tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk serta bijaksana menghargai adat.
- 2. Sumatera Utara Yang Sejahtera** adalah masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin berdasarkan keperluan baik individu maupun kelompok yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan penduduk Sumatera Utara yang sehat, layak dan manusiawi.
- 3. Sumatera Utara Dalam Harmoni Keberagaman** bermakna terbentuknya kesesuaian dan keharmonisan masyarakat Sumatera Utara yang beragam di mana hak, kesempatan dan keragaman tersebut diberikan untuk dapat dinikmati secara bersama-sama dan adil oleh setiap kelompok dalam masyarakat di Sumatera Utara.

Dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan dan indikator kinerja sebagai tolak ukur capaiannya. Sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tentunya mengacu pada RPJMD Tahun 2009-2013, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan seperti telah dirumuskan dalam rencana jangka menengah.

Hal penting yang menjadi fokus pembangunan di tahun ke empat RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2012, adalah berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai lanjutan dari RPJM-D ke-1 maka RPJM-D ke-2 difokuskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Utara baik pada tingkat aparatur pemerintahan maupun anggota masyarakat terutama pada sektor produksi, dan distribusi/ pemasaran khususnya pada pelaku usaha kecil, menengah / koperasi dan usaha mikro termasuk pembinaan pedagang kaki lima sehingga berkembang menjadi pengusaha kecil formal dengan tetap memelihara dan menunjang pertumbuhan sektor-sektor lain yang telah dicapai pada pembangunan RPJM- D ke-1.

Kesejahteraan masyarakat yang komponen-komponennya adalah tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, pemerkerjaan (*employment*), kesehatan dan lain-lain dicerminkan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara maka strategi yang perlu dikembangkan dalam tahapan ini ialah peningkatan pendapatan per kapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi), pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah, antar kelompok masyarakat dan antar individu, pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pembangunan pendidikan sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas sumberdaya manusia diarahkan tidak pada sebatas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara tetapi juga kepada peningkatan kemandirian bekerja, pembudayaan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta pematangan psikis dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor kritis dalam bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dalam mencapai keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia ialah pengadaan guru-guru bermutu yang semakin mencukupi baik pada sekolah dasar maupun sekolah lanjutan, perbaikan gedung-gedung sekolah terutama di daerah pedesaan, perbaikan/ pengembangan kurikulum serta pengadaan buku-buku yang terjangkau. Pembangunan laboratorium terpadu di kota-kota yang memiliki kemampuan pendanaan perlu didukung untuk dimanfaatkan secara bersama oleh sekolah-sekolah di wilayah kabupaten sekitarnya.

Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke-2 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam penggalian dan pengolahan sumberdaya alam, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya alam secara berkelanjutan baik yang terbarukan maupun tak terbarukan.

Sarana/fasilitas sekolah seperti kecukupan guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Dalam tahapan ini, angka Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara akan berhasil ditingkatkan menjadi >75 dengan kisaran 30 % berada pada  $IPM > 80$ , sebanyak 65 % berada pada 66-80 dan sebanyak 5% berada pada kisaran 55-66.

Beberapa kebijakan penting lain yang perlu menjadi prioritas pembangunan dalam tahap ini ialah pengembangan infrastruktur ekonomi pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Kawasan Pantai Timur, Kawasan Dataran Tinggi, Kawasan Pantai Barat, Kawasan Pantai dan kawasan unggulan lainnya) yang meliputi jaringan jalan (jalan lingkar luar Danau Toba, jalan Rawa Saring, jalan menyusur Pantai Timur), Penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu, Pengembangan Pelabuhan Laut, Pengembangan Perkeretaapian, sumberdaya air

bersih, pemanfaatan potensi sumber tenaga listrik secara maksimal, dan pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Juga perlu ditumbuhkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam peningkatan produktivitas masyarakat khususnya tenaga kerja pada usia produktif baik melalui pendidikan, maupun pelatihan dan permagangan dengan metode yang kontemporer (non-tradisional).

Pengadaan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman dalam tata ruang wilayah yang serasi dan asri akan semakin ditingkatkan sehingga kebutuhan rumah yang sehat semakin terpenuhi tidak hanya di lingkungan perkotaan tetapi juga di perdesaan, antara lain melalui Program Pengembangan Kualitas Permukiman (PKP); Pengembangan Kasiba dan Lisiba; Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan; Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan termasuk di dalamnya Rusunawa dan Rusunami, Perumahan KORPRI, dan RSS (Rumah Sangat Sederhana), Pengembalian Fungsi Kawasan Permukiman melalui Peremajaan di Metropolitan dan lain-lain.

Karena ketersediaan energi sangat strategis dan telah terbukti sebagai salah satu penghambat utama dalam meningkatkan investasi dan produksi nasional maka dalam tahap ini, masalah-masalah berkaitan dengan kelangkaan pasokan energi hendaknya sudah dapat diatasi secara baik. Untuk mencapai keadaan tersebut, sumber-sumber energi yang tersedia di daerah ini baik tenaga air termasuk mikrohidro maupun panas bumi, tenaga surya dan biomas perlu dimanfaatkan secara maksimal dan hasil-hasilnya dapat diakses oleh masyarakat tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa dengan proporsi yang semakin besar.

Dalam rencana pembangunan sektor pertanian perlu adanya dukungan di dalam sarana dan prasarana seperti pembangunan dan perbaikan irigasi, pengadaan bibit unggul (menciptakan varietas baru) serta perkembangan teknologi di bidang pertanian. Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian perlu peningkatan pertumbuhan produksi, luas arel perkebunan, peningkatan populasi ternak serta peningkatan ekspor di bidang pertanian.

Masalah dan tantangan yang akan dihadapi di bidang kesehatan yaitu masih relatif rendahnya derajat kesehatan masyarakat, untuk masa yang akan datang peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan kepada kebijakan peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar.

Selanjutnya, dari fokus pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, diperlukan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pembangunan di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pertanian dalam kerangka kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Rakyat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa
- b. Rakyat tidak lapar
- c. Rakyat tidak bodoh
- d. Rakyat tidak sakit
- e. Rakyat punya masa depan.

Oleh sebab itu sejak Tahun 2009 s/d Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas sekaligus melakukan evaluasi dan analisis terhadap program dan kegiatan prioritas.

Selama kurun waktu Tahun 2012, pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana Target Kinerja yang diperjanjikan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 pada umumnya telah tercapai dengan baik atau capaian kinerjanya adalah 100%, meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian kinerja masih relatif baik yang ditunjukkan oleh tingkat ketercapaian indikator-indikator dalam sasaran tersebut yang cukup tinggi.

Namun demikian, diakui masih ada indikator sasaran yang tingkat capaiannya kurang dari 50% , hal tersebut disebabkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Kondisi ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.